



Teologi Birokrasi Yesus dan Para Rasul: Paradigma Alternatif untuk Kepemimpinan Etis di Indonesia

Harun¹, Rannu Sanderan²

Institut Agama Kristen Negeri Toraja

harunsiang502@gmail.com¹, rannusan@gmail.com

Abstract: *This article proposes the theology of bureaucracy as a novel conceptual paradigm, derived from the leadership model of Jesus and the apostles in the New Testament. The paradigm emphasizes the values of service, humility, and sacrifice as a critical ethical alternative to conventional bureaucratic systems, which are typically centered on hierarchy, authority, and power. Employing a qualitative methodology through biblical text analysis and a hermeneutic approach, this study compares the ideological features of Roman imperial bureaucracy with those of contemporary public administration in Indonesia. The findings indicate that Jesus' leadership principles, when formulated as an operational framework, have the potential to reshape bureaucratic structures toward greater moral integrity, transparency, and public accountability. This study contributes conceptually to the emerging literature on bureaucratic theology and offers a faith-informed leadership model relevant for Christian bureaucrats, theologians, and policymakers. Furthermore, the findings open new pathways for interdisciplinary inquiry at the intersection of public administration, theological ethics, and ethical leadership studies.*

Keywords: *theology of bureaucracy, servant leadership, New Testament ethics, public administration, Indonesian bureaucracy, ethical governance.*

Abstrak: Artikel ini mengusulkan teologi birokrasi sebagai paradigma konseptual baru yang diangkat dari model kepemimpinan Yesus dan para rasul dalam Perjanjian Baru. Paradigma ini menekankan nilai-nilai pelayanan, kerendahan hati, dan pengorbanan sebagai alternatif etis terhadap sistem birokrasi konvensional yang umumnya berfokus pada hierarki, otoritas, dan kekuasaan. Dengan menggunakan metodologi kualitatif melalui analisis teks biblikal dan pendekatan hermeneutik, studi ini membandingkan karakteristik ideologis birokrasi Kekaisaran Romawi dengan dinamika birokrasi publik Indonesia masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan Yesus, ketika dirumuskan secara operasional, dapat membentuk ulang praktik birokrasi



menuju sistem yang lebih etis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Studi ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur teologi birokrasi dan menawarkan model kepemimpinan berbasis iman yang relevan bagi birokrat Kristen, teolog, dan pembuat kebijakan. Selain itu, temuan ini membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut dalam kajian interdisipliner di bidang administrasi publik, etika teologis, dan kepemimpinan etis.

Kata Kunci: teologi birokrasi, kepemimpinan pelayanan, etika Perjanjian Baru, administrasi publik, birokrasi Indonesia, tata kelola etis.

Article

Received: 29-11-2024 Revised: 23-05-2025 Accepted: 28-05-2025

History:

1. Pendahuluan

Selama bertahun-tahun, birokrasi masih dianggap terpisah dari penatalayanan gereja, tetapi faktanya banyak pemimpin Kristen yang terlibat dalam sistem birokrasi. Meskipun demikian, peran pemimpin Kristen dalam birokrasi dapat dipahami sebagai penatalayanan yang didasarkan pada teologi. Penelitian Harun menunjukkan bahwa birokrat Kristen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara mengalami kesulitan dalam menyelaraskan misi pelayanan Kristen dengan tuntutan birokrasi pemerintahan yang hierarkis dan berlandaskan pada kewenangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa birokrat Kristen sering kali mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pelayanan dan kerendahan hati ke dalam metode birokrasi yang hierarkis.¹ Kekuasaan, otoritas, dan hierarki sering mendominasi perspektif tentang birokrasi, yang cenderung bertentangan dengan ajaran pelayanan dan kerendahan hati yang diajarkan Yesus dan para rasul.

Cara Yesus dan para rasul menerapkan prinsip kepemimpinan yang berbeda dengan kekuasaan duniawi, terutama dalam konteks kekuasaan Romawi yang cenderung otoriter, ditunjukkan dalam Perjanjian Baru. Prinsip-prinsip pelayanan, kerendahan hati, dan tanggung jawab moral yang diajarkan Yesus menawarkan paradigma alternatif untuk birokrasi yang etis dan manusiawi. Mereka dapat membangun sistem kepemimpinan yang efektif dan berlandaskan moral yang luhur jika prinsip-prinsip ini diterapkan pada birokrasi modern di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji birokrasi dalam hubungannya dengan teologi, di antaranya: Edwards menggarisbawahi betapa pentingnya menggunakan Injil Perdamaian untuk mengatasi kekerasan birokrasi secara damai dan

¹ Harun, "Misi Sang Birokrat: Analisis Teologis Misi Birokrat Kristen Dalam Birokrasi Pemerintahan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara." (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja), 2024), <http://digilib-iaknortoraja.ac.id/1672/>.

moral.² Figueroa melihat bagaimana Reformasi Protestan mengalihkan fokus dari agama ke keterampilan duniawi, yang mendukung efisiensi birokrasi modern.³ Deslandes menawarkan teologi yang lemah, yang menekankan kepemimpinan yang ramah dan fleksibel sebagai pengganti otoritas birokrasi yang kaku.⁴ Sampe dan Petrus mengatakan bahwa kepemimpinan Kristen yang cerdas dan visioner sangat penting untuk menghadapi postmodernisme dan globalisasi.⁵ Sementara itu, Cole dalam artikelnya *When Gods Become Bureaucrats* membahas bagaimana penggambaran para dewa dalam masyarakat kuno dapat dijadikan landasan simbolik untuk membangun legitimasi birokrasi dan memperkuat stabilitas sosial melalui narasi keagamaan yang dilembagakan.⁶ Secara keseluruhan kelima tulisan sebelumnya, telah berkonsentrasi pada bagaimana nilai-nilai teologis dapat mempengaruhi dan mengubah struktur birokrasi untuk menciptakan sistem yang lebih manusiawi, moral, dan sesuai dengan dinamika zaman sekarang. Penelitian terdahulu ini, menunjukkan bahwa teologi dapat berfungsi sebagai dasar untuk birokrasi yang lebih etis, manusiawi, dan inklusif. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk membawa paradigma baru dalam manajemen organisasi dan pemerintahan.

Studi berjudul ***"Teologi Birokrasi Yesus dan Para Rasul: Paradigma Alternatif untuk Kepemimpinan Etis di Indonesia"*** menyajikan sudut pandang yang baru dan menarik dengan menekankan kerangka teologi birokrasi Yesus dan para rasul sebagai paradigma kepemimpinan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya menekankan nilai-nilai etis dalam birokrasi. Penelitian ini memasukkan paradigma teologi birokrasi sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk membaca ulang dinamika birokrasi melalui nilai pelayanan Kristiani. Artikel ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan Yesus, tetapi juga membentuknya menjadi struktur sistematis yang dapat digunakan untuk menilai dan membentuk ulang birokrasi publik secara konkret.

Model ini relevan dengan lingkungan Indonesia karena menggarisbawahi cita-cita pelayanan, kerendahan hati, dan pengorbanan sebagai alternatif etis terhadap lembaga birokrasi yang seringkali hierarkis dan otoriter. Paradigma alternatif yang berbasis nilai-

² Aaron Edwards, "The Violence of Bureaucracy and the Gospel of Peace: A Theological Response to an Academic Problem," *International Journal of Public Theology* 12 (2) (2018): 195–217, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15697320-12341535>.

³ Valentin Figueroa, "The Protestant Road to Bureaucracy," *World Politics* 75 (2) (2023): 390–437, <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/wp.2023.0006>.

⁴ G Deslandes, "Weak Theology and Organization Studies," *Organization Studies* 41 (2020): 127–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0170840618789209>.

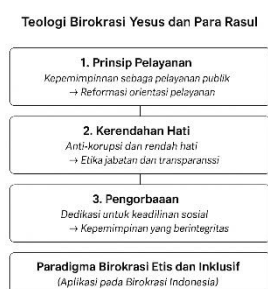
⁵ Naomi Sampe and Simon Petrus, "Realita Kompleks Pemimpin Kristen : Hikmat Dan Integritas Pemimpin Kristen Menghadapi Laju Perubahan Dunia Sebagai Dampak Globalisme Dan Postmodernisme," *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pembedayaan Jemaat* 2, no. 2 (2021): 133–46, <https://kinaa.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsdatakinaa/article/view/35%0Ahttps://kinaa.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsdatakinaa/article/download/35/24>.

⁶ Richard Cole, "When Gods Become Bureaucrats," *Harvard Theological Review* 113 (2) (2020): 186–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0017816020000048>.

nilai etika pelayanan, kerendahan hati, dan persatuan ditawarkan dalam tulisan ini. Sebagai paradigma interpretatif, teologi birokrasi melihat birokrasi publik melalui prinsip-prinsip pelayanan, kerendahan hati, dan pengorbanan yang dicontohkan Yesus dalam Perjanjian Baru. Kerangka ini terdiri dari tiga prinsip utama:

1. Pelayanan sebagai dasar kuasa: Kepemimpinan dilihat bukan sebagai dominasi, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan penguatan komunitas.
2. Kerendahan hati sebagai struktur kepemimpinan: Menolak hierarki otoriter demi struktur relasional dan kolaboratif.
3. Pengorbanan sebagai integritas etis: Pemimpin yang rela meletakkan kepentingan pribadi demi kesejahteraan bersama.

Gambar berikut menunjukkan kerangka konseptual yang menggabungkan tiga pilar utama birokrasi: pelayanan, kerendahan hati, dan pengorbanan. Ini akan memperjelas bagaimana teologi birokrasi berfungsi sebagai paradigma analitis. Ketiga prinsip ini berfungsi sebagai norma dan dasar untuk mempertimbangkan birokrasi publik Indonesia untuk menjadi lebih manusiawi, moral, dan kontekstual.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Teologi Birokrasi sebagai Paradigma Analitis

Metode ini memungkinkan suatu perspektif yang berbeda karena menantang struktur birokrasi yang menindas dan kaku. Sebagai dasar analisis utama, studi ini mengembangkan sebuah kerangka konseptual yang disebut teologi birokrasi. Studi ini menggunakan istilah "teologi birokrasi" sebagai kerangka sintesis antara struktur dan dinamika birokrasi modern dan nilai-nilai teologis yang berasal dari ajaran Yesus Kristus. Penulis mengembangkan istilah ini berdasarkan model kepemimpinan Yesus dalam Perjanjian Baru dan praktik pelayanan yang menekankan pengorbanan, kerendahan hati, dan pelayanan publik. Dengan demikian, teologi birokrasi di sini bukan hanya refleksi tentang etika, tetapi dikembangkan menjadi paradigma konseptual yang menawarkan pendekatan transformatif terhadap praktik birokrasi modern. Istilah ini merupakan hasil pengembangan teoritis orisinal yang dikontekstualisasikan untuk menjawab kebutuhan birokrasi etis di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menyelidiki prinsip-prinsip kepemimpinan Yesus dan para rasulnya yang ditemukan dalam Perjanjian Baru.⁷ Metode ini menggunakan pendekatan analisis teks atau hermeneutik, yaitu dengan menafsirkan teks-teks Perjanjian Baru (misalnya Markus 10:42–45, Yohanes 13:1–17, Filipi 2:5–8, dan Matius 20:25–28) secara kontekstual untuk menggali makna kepemimpinan menurut Yesus dan para rasul. Penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis masa kekuasaan Romawi, serta kaitannya dengan prinsip-prinsip birokrasi publik modern di Indonesia. Fokus analisis teks terletak pada diksi, struktur narasi, dan nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan membangun kerangka teologi birokrasi sebagai paradigma kepemimpinan moral. Tujuan dari analisis teks adalah untuk memperoleh pemahaman tentang arti pelayanan dan otoritas yang diajarkan Yesus dalam ajarannya, serta bagaimana hal-hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip birokrasi Romawi. Selain itu, penelitian ini melibatkan penyelidikan kepustakaan untuk mengevaluasi literatur yang telah ditulis tentang teologi birokrasi dan kepemimpinan Kristen.⁸ Pendekatan historis-kritis dalam penelitian ini difokuskan pada analisis latar sosio-politik Kekaisaran Romawi pada abad pertama, termasuk struktur kekuasaan, sistem administrasi provinsi, dan relasi kekuasaan antara otoritas Romawi dan komunitas Yahudi. Tujuannya adalah untuk memahami secara kontekstual latar munculnya prinsip-prinsip kepemimpinan Yesus dalam Perjanjian Baru, serta membandingkannya dengan model birokrasi otoriter yang mendominasi saat itu. Selain itu, metode ini melibatkan analisis perbandingan untuk membandingkan nilai-nilai kepemimpinan Alkitab dengan praktik birokrasi kontemporer di Indonesia. Pendekatan ini menjadi sangat relevan untuk birokrasi etis saat ini.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

A. Perspektif Perjanjian Baru

Dalam birokrasi Romawi, struktur kekuasaan bersifat sentralistik dan hierarkis. Hal ini terlihat jelas dari fungsi Kaisar sebagai pusat pemerintahan dan wewenang didistribusikan melalui lapisan-lapisan pejabat, termasuk gubernur provinsi (juga dikenal sebagai *legatus*), bendahara kerajaan (juga dikenal sebagai *procurator*), dan pejabat lokal lainnya. Sistem ini menekankan otoritas vertikal dan subordinasi. Tidak

⁷ John W. Creswell and J. David Creswell, "Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition," in *Introducing English Language* (Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2018), 50–51.

⁸ Endah Marendah Ratnaningtyas et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Nanda Saputra, Pertama (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 8.

⁹ Humar Sidik and Ika Putri Sulistyana, "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2021): 19, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6224>.

seperti prinsip kepemimpinan Yesus dan para rasul dalam Perjanjian Baru, yang mengutamakan pelayanan dan kerendahan hati.¹⁰

1. Pelayanan sebagai Inti dari Kepemimpinan

Dalam narasi Markus 10:42-45, "Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu," perkataan Yesus ini, secara eksplisit menentang gaya kepemimpinan yang dominan ala bangsa-bangsa lain. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dari perspektif Yesus, kepemimpinan adalah panggilan untuk melayani bukan untuk menguasai atau mendominasi. Teks ini menunjukkan pembalikan umum dari struktur kuasa yang umum dalam sistem hierarkis. Ini juga berfungsi sebagai dasar etis dari kerangka teologi birokrasi yang berpusat pada pelayanan.¹¹ Sejalan dengan yang ditemukan dalam Yohanes 13:1-17, di mana Yesus membasuh kaki murid-murid-Nya. Tindakan ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga menunjukkan makna kepemimpinan yang rendah hati dan berkorban.¹² Dalam kedua teks ini, Yesus mengubah struktur hierarki yang telah ada sebelumnya. Pada saat itu, membasuh kaki adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pelayan atau budak dan seorang pemimpin adalah seorang yang memegang kekuasaan, sehingga tindakan ini menantang norma sosial dan menunjukkan pelayanan yang tulus dan tanpa pamri dari kepemimpinan.

2. Fondasi Kepemimpinan Birokrasi

Dalam Filipi 2:5-8, Paulus menyatakan bahwa "Kristus Yesus... mengosongkan diri-Nya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba." Secara teologis, istilah "mengosongkan diri", juga dikenal sebagai "kenosis," menggambarkan keputusan Yesus untuk meninggalkan status, kehormatan, dan otoritas-Nya sebagai Anak Allah dan bertindak sebagai manusia biasa, bahkan menjadi pelayan yang menderita. Ini bukan sekadar sikap yang rendah hati; itu adalah tindakan yang benar-benar menanggalkan segala keistimewaan untuk menyatu dengan penderitaan manusia.¹³ Dalam birokrasi publik, mengorbankan posisi atau status dapat diartikan sebagai kesediaan para pemimpin untuk mengabdikan posisi mereka daripada menggunakannya sebagai tanda kekuasaan atau kehormatan. Seorang birokrat atau pejabat publik yang menunjukkan kenosis akan bersedia melepaskan hak-hak mereka yang eksklusif, seperti fasilitas, otoritas, atau dominasi, untuk membangun pelayanan yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Oleh karena

¹⁰ Fergus Millar, *The Emperor in the Roman World, 31 BC-AD 337*, Cambridge (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1977), 6-15.

¹¹ Natanael S. Prajogo, "Implementasi Kepemimpinan Gembala Yang Melayani Berdasarkan 1 Petrus 5:2-10 Di Kalangan Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Se-Jawa Tengah," *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 4, no. 1 (2019): 1-21, <https://doi.org/10.52104/harvester.v4i1.5>.

¹² Samuel Herman and Rinaldi Dharmawan, "Pemimpin Sejati Dengan Pola Kepemimpinan Yesus," *Skenoo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2024): 24-36, <https://doi.org/10.55649/skenoo.v4i1.82>.

¹³ Joko Santoso, "Pelayanan Hamba Tuhan Dalam Tugas Pengembalaan Jemaat," *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 9, no. 1 (2020): 1-26, <https://doi.org/10.46495/sdjt.v9i1.55>.

itu, kepemimpinan yang berlandaskan iman berarti berkomitmen, bermoral, dan bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat yang dilayani.

Selain itu, Yesus mengatakan, "Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang," (Mrk. 10:45). Ini adalah contoh terbaik dari pengorbanan. Metode ini berpendapat bahwa kekuasaan sejati berasal dari integritas, empati, dan kerendahan hati, bukan dari posisi atau kekuatan.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa pengorbanan adalah bagian penting dari kepemimpinan yang benar, di mana seorang pemimpin bersedia memberikan yang terbaik dari diri mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri mereka sendiri.

3. Tujuan Kepemimpinan Birokrasi

Yesus memberi tahu para pemimpin bahwa kepentingan komunitas harus lebih penting daripada kepentingan individu atau kelompok elit. Dalam Lukas 22:25-27, Yesus berkata, "Raja-raja bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas mereka... tetapi kamu tidaklah demikian." Pernyataan ini adalah kritik langsung terhadap model kekuasaan duniawi, terutama model Romawi, yang sering berfokus pada kekayaan dan dominasi.¹⁵ Seperti yang disebutkan dalam Matius 20:25-28, "barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu". Dalam kedua teks ini, Yesus jelas mengajarkan model kepemimpinan yang mengutamakan kesejahteraan bersama daripada keuntungan pribadi.¹⁶ Pernyataan ini mendukung ide bahwa kepemimpinan yang benar berarti membantu orang lain, memperlakukan mereka dengan hormat dan martabat, dan memprioritaskan kebutuhan orang lain daripada kepentingan pribadi.

4. Instruksi Anti-Kekerasan dan Perdamaian

Yesus juga mengajarkan perdamaian dan anti-kekerasan sebagai bagian integral dari kepemimpinan yang etis. Dalam Matius 5:9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah," pesan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya menyangkut pencapaian tujuan, tetapi juga menyangkut cara dan nilai-nilai yang digunakan dalam mencapainya. Melalui pendekatan historis-kritis, khususnya dengan menempatkan teks-teks Injil dalam konteks sosial-politik kekaisaran Romawi yang represif dan militeristik, pernyataan ini dapat dibaca sebagai bentuk tandingan terhadap praktik kekuasaan

¹⁴ Heliyanti Kalintabu and Royke Lantupa Kumowal, "Kepemimpinan Yesus Sebagai Model Bagi Pemimpin Kristen Di Sekolah Tinggi Teologi," *Jurnal Manajemen Pendidikan Kristen* 3, no. 1 (2023): 63-81, <https://doi.org/https://doi.org/10.51667/jmpk.v3i1.1347>.

¹⁵ Ersada Siregar and Yanto Paulus Hermanto, "Sistem Pemerintahan Gereja Yang Dapat Menjaga Kepemimpinan Alkitabiah," *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 4, no. 2 (2023): 117-30, <https://doi.org/10.47530/edulead.v4i2.167>.

¹⁶ Sanherib Boling, B D Nainggolan, and A Hendrik, "Analisis Filosofis Tentang, Metode Yesus Dan Keterlibatan Jemaat Dalam Penginjilan," *MAGENANG: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (2023): 25-29, <https://doi.org/10.51667/mjtpk.v4i1.1306>.

yang mengandalkan dominasi dan kekerasan struktural.¹⁷ Lebih tegas lagi, dalam Matius 26:52, Yesus menyatakan, “Kembalikan pedangmu ke tempatnya, sebab barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang.” Pernyataan ini tidak sekadar seruan moral, tetapi bentuk penolakan aktif terhadap konsep kekuasaan koersif yang menjadi ciri birokrasi Romawi pada abad pertama Masehi.¹⁸

Dengan demikian, kepemimpinan yang didasarkan pada ajaran Yesus mendorong cara hidup yang damai, etis, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Ini bertentangan secara langsung dengan cara birokrasi Romawi yang menekankan hierarki, pengawasan militer, dan penguncian kekuasaan. Nilai-nilai Kristiani seperti pelayanan, kerendahan hati, dan perdamaian muncul sebagai alternatif untuk sistem yang mendominasi. Selain itu, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan bagi paradigma kepemimpinan profetik yang lebih humanis, transformatif, dan relevan untuk birokrasi modern yang sering menghadapi tantangan etis dan sosial.

B. Prinsip Kepemimpinan Perjanjian Baru dan Birokrasi Romawi

Sistem birokrasi dibangun pada awal Kekaisaran Romawi (periode Principate) untuk memperkuat kekuasaan pusat dan menjaga kestabilan wilayah provinsi yang luas. Kaisar, yang dianggap memiliki legitimasi Tuhan, memegang kekuasaan tertinggi melalui struktur administrasi yang hierarkis. Struktur ini termasuk senator, gubernur (legatus), bendahara (procurator), dan pejabat militer (centurion). Sistem ini tidak dibangun untuk pelayanan publik modern, tetapi untuk kepentingan imperium, yaitu meningkatkan efisiensi administrasi, mengumpulkan pajak, dan menjaga ketertiban. Birokrasi dilaksanakan secara represif dan militeristik di banyak tempat, terutama di provinsi yang rentan terhadap pemberontakan. Sistem ini menekankan kepatuhan dan setia kepada negara daripada mendorong partisipasi warga. Sebagaimana dicatat oleh Fergus Millar dalam penelitiannya tentang birokrasi kekaisaran Romawi, model birokrasi ini mencerminkan dominasi vertikal dan penguatan otoritas pusat.¹⁹

1. Kuasa Hierarkis yang Terpusat

Birokrasi Romawi memiliki kekuasaan yang sangat terpusat dan berjenjang. Kaisar berada di puncak hierarki dan dianggap hampir seperti Tuhan. Di lapisan bawah, otoritas didistribusikan secara ketat melalui lapisan pejabat dan cenderung otoriter.²⁰ Dalam ajaran Yesus (Markus 10:42–45), kepemimpinan diartikan sebagai komitmen untuk melayani, bukan untuk menduduki posisi tertinggi dalam struktur

¹⁷ Mikha Agus Widiyanto and Armin Sukri, “Perwujudan Kebahagiaan Dalam Relasi Interpersonal: Implementasi Etika Kerajaan Allah Berdasarkan Matius 5:3-9,” *Kurios* 8, no. 1 (2022): 175, <https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.547>.

¹⁸ Novita Indriani Rorong, “Budaya Kekerasan Dalam Media Elektronik Ditinjau Dari Sudut Pandang Etika Kristen,” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 3, no. 1 (2020): 88–109, <https://doi.org/10.34081/fidei.v3i1.97>.

¹⁹ Millar, *The Emperor in the Roman World, 31 BC–AD 337*, 25–42.

²⁰ Michael Wuk, “Constructing Christian Bureaucrats: Justinian and the Governor’s Oath of Office.,” *Journal of Late Antiquity* 15 Number (2022): 462–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/jla.2022.0024>.

organisasi. "Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu," Yesus menantang norma umum bahwa menjadi besar berarti melayani, bukan memerintah.²¹ Konsep ini menghasilkan "hierarki terbalik" di mana kemurahan hati dan pengorbanan adalah sumber kekuatan tertinggi.

2. Kendali dan Kontrol Rantai Kekuasaan

Kekerasan sering digunakan oleh birokrasi Romawi untuk menjalankan pemerintahan. Seorang pejabat atau birokrat diharapkan bertindak dengan tegas terhadap rakyat dan menjaga ketertiban melalui ancaman. Dengan tekanan sistem, seringkali dengan kekerasan atau intimidasi, pejabat dipaksa untuk mencapai tujuan negara.²² Yesus malah mengajarkan model kepemimpinan yang berbeda. Yesus mengingatkan para murid-Nya dalam Lukas 22:25-27 bahwa mereka tidak boleh "bertindak sebagai tuan" seperti para penguasa bangsa-bangsa. Akibatnya, Yesus menolak gaya kepemimpinan yang memaksa dan memilih gaya kepemimpinan yang lebih berfokus pada membangun hubungan dan kerja sama yang manusiawi dan damai.

3. Kekuasaan sebagai komoditas dan aset

Dalam birokrasi Romawi, jabatan sering dianggap sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Seringkali, orang-orang dalam posisi kekuasaan membeli jabatan mereka untuk memperoleh pengaruh atau memperkaya diri. Sumber daya sering dieksploitasi demi kepentingan pribadi pejabat.²³ Namun, ajaran Yesus menganggap kepemimpinan sebagai panggilan untuk melayani tanpa pamrih daripada peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seorang pemimpin harus siap mengorbankan sesuatu untuk kebaikan bersama, seperti yang disebutkan dalam Matius 20:28, ketika Yesus berkata, "Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani".²⁴ Paradigma ini melihat kekuasaan sebagai kesempatan untuk menunjukkan pengabdian dan kasih sayang yang tulus daripada aset.

4. Kekerasan sebagai Alat Pertahanan Sistem

Kekaisaran Romawi membuat sistem birokrasi yang terpusat dan menggunakan militer yang represif untuk mempertahankan kekuasaannya. Aparat keamanan, yang terdiri dari pasukan legiun dan garnisun lokal, digunakan untuk menertibkan wilayah-wilayah provinsi untuk menjamin ketaatan kepada otoritas

²¹ Misdon Silalahi et al., "Karakteristik Kepemimpinan Kristen Melalui Keteladanan Yesus Dalam Melayani Berdasarkan Markus 10: 43-45," *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kerusso* 8, no. 1 (2023): 53-61, <https://doi.org/10.33856/kerusso.v8i1.272>.

²² Lovejoy Chabata, "Paul, the Prisoner (Acts 23:34-35): An Insight into 2018-2022 Political Prisoner's Rights in Zimbabwe," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 4 (2023): 34-35, <https://doi.org/10.4102/hts.v79i4.8984>.

²³ G. J Malan, "God's Patronage Constitutes a Community of Compassionate Equals Clients in Crisis: The Context of Understanding Metaphor Dynamic ;," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 2020, 1-8, <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0001-9997-2368>.

²⁴ Daniel C. Unachukwu, "A Study of Matthew 20:20-28 in Relation to Pentecostal Churches Leadership in Nigeria," *African Journal of Pentecostal Studies* 1, no. 1 (2024): 1-7, <https://doi.org/10.4102/ajops.v1i1.13>.

pusat dan mencegah pemberontakan. Tindakan represif seperti eksekusi dan hukuman publik menjadi alat untuk menanamkan ketakutan dan ketundukan. Menurut Fergus Millar dalam *The Emperor in the Roman World*, peran tentara sangat penting untuk mengatur pemerintahan Romawi dan menjaga kekaisaran stabil, terutama di wilayah perbatasan dan daerah yang sering mengalami konflik politik.²⁵

Sebaliknya, ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru secara tegas menolak kekerasan sebagai sarana mencapai tujuan. Dalam Matius 5:39, Yesus berkata, "janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu", dan dalam Matius 26:52, Ia memperingatkan, "barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang." Konsep ini menekankan bahwa kepemimpinan yang benar tidak bergantung pada kekerasan atau kekerasan, tetapi pada kasih sayang, pengampunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yesus memberikan paradigma kepemimpinan yang etis dan transformatif dalam konteks ini, dengan menempatkan kemanusiaan di atas kekuasaan struktural.²⁶

5. Eksploitasi Birokrasi Ekonomi

Dalam catatan sejarah yang menunjukkan ketimpangan distribusi dan penindasan terhadap provinsi, birokrasi ekonomi Kekaisaran Romawi dicirikan oleh pajak yang tinggi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat lokal. Sistem ini menyebabkan kesenjangan sosial, di mana kepentingan negara dan elit kekuasaan lebih penting daripada kesejahteraan umum.²⁷ Dalam konteks ini, kritik etis yang relevan diberikan oleh pernyataan yang dibuat Yesus dalam Matius 6:24, "Tidak seorang pun dapat mengabdikan kepada dua tuan... kamu tidak dapat mengabdikan kepada Allah dan kepada Mammon." Dalam teks ini ditekankan bahwa pelayanan publik dan kekuasaan tidak boleh dijalankan untuk keuntungan pribadi atau akumulasi kekayaan.²⁸ Oleh karena itu, ajaran Yesus mempromosikan nilai-nilai alternatif yang menantang skema birokrasi ekonomi yang berpusat pada penguasaan dan eksploitasi.

Pendekatan ini tampak bertentangan dengan prinsip kepemimpinan Yesus yang menekankan pelayanan, kerendahan hati, dan perdamaian sebagai dasar tindakan publik. Ini disebabkan oleh karakteristik birokrasi Romawi yang bersifat hierarkis, represif, dan berfokus pada kepentingan imperium, sebagaimana tergambar dalam struktur kekuasaan yang dijalankan secara top-down oleh para pejabat Romawi.

²⁵ Millar, *The Emperor in the Roman World*, 31 BC-AD 337, 42-55.

²⁶ Sri Rizki Marpaung, "Kecerdasan Emosional Menurut Matius 5:1-48 Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Untuk Remaja Di Era Digital," *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 2 (2023): 147-63, <https://doi.org/10.33541/rfidei.v8i2.174>.

²⁷ Bofei Fan and Birong Zhang, "The Manifestations, Causes and Influences of Economic Inequality in the Roman Empire from the 4th to the 5th Centuries," *Proceedings of the 2021 International Conference on Public Art and Human Development (ICPAHD 2021)* 638, no. Icpahd 2021 (2022): 758-62, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220110.144>.

²⁸ Yakobus Adi Saingo, "Christian Teacher and Anti-Materialistic Actualization According to the Gospel Matthew 6:19-24," *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 18, no. 1 (2022): 64-82, <https://doi.org/10.46494/psc.v18i1.193>.

C. Relevansi untuk Birokrasi Modern di Indonesia

Korupsi, penyalahgunaan wewenang, efisiensi rendah, dan akuntabilitas publik adalah masalah struktural yang persisten dalam birokrasi modern Indonesia. Studi tentang birokrasi di Indonesia menemukan bahwa standar moral dalam pengambilan keputusan publik seringkali tidak sejalan dengan dominasi kekuasaan. Dalam keadaan seperti ini, paradigma etis yang ditawarkan oleh Perjanjian Baru, yang menekankan pelayanan, kerendahan hati, dan pengorbanan, dapat dipertimbangkan kembali. bukan sebagai pengganti birokrasi negara secara sistematis, tetapi sebagai sistem nilai yang dapat meningkatkan aspek moral birokrasi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini dapat membantu membangun birokrasi yang lebih responsif, terlibat, dan berkeadilan sosial.

1. Prinsip Pelayanan digunakan dalam Kepemimpinan Publik

Akses publik terhadap layanan dasar sering dihalangi oleh praktik birokrasi Indonesia yang berfokus pada kontrol prosedural dan hierarki formal. Model seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah salah satu upaya reformasi yang bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berantakan dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Namun, masalah seperti orientasi kekuasaan, ketidakterbukaan, dan keterbatasan akses sering menghambat semangat pelayanan.²⁹ Prinsip kepemimpinan Yesus yang menjadikan pelayanan sebagai inti otoritas (Markus 10:45) dapat dibaca sebagai tawaran moral yang relevan dalam konteks ini. Menurut ajaran ini, pemimpin bertanggung jawab untuk membantu komunitas daripada hanya memiliki kekuasaan administratif.³⁰ Jika nilai-nilai ini digunakan sebagai kerangka etis saat membuat kebijakan, birokrasi Indonesia memiliki peluang untuk lebih fokus pada memenuhi kebutuhan masyarakat secara inklusif dan manusiawi.

2. Kerendahan Hati Meningkatkan Integritas

Kerendahan hati bukan hanya sikap pribadi dalam etika kepemimpinan Perjanjian Baru; itu adalah cara moral untuk menentang sistem kekuasaan yang menindas. Dalam ajaran Paulus tentang kenosis dalam Filipi 2:6–8, kita dapat melihat bagaimana Kristus secara sadar "mengosongkan diri" dan meninggalkan kekuatan untuk kepentingan yang lebih besar. Prinsip kerendahan hati ini dapat dimaknai sebagai seruan untuk membangun etika pelayanan yang berakar pada integritas, transparansi, dan kepekaan sosial dalam konteks birokrasi modern Indonesia, yang sering ditandai oleh orientasi vertikal, simbol status, dan penyalahgunaan

²⁹ Darmawan Choirulsyah and Azhar Azhar, "Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 195–203, <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>.

³⁰ Justin R. Craun and Joshua D. Henson, "Transitioning to a Servant Leadership Culture Through the Teachings of Jesus," *European Journal of Theology and Philosophy* 2, no. 2 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.24018/theology.2022.2.2.61>.

kekuasaan.³¹ Dalam hal ini, kerendahan hati tidak identik dengan kelemahan; sebaliknya, itu merupakan kekuatan moral untuk menahan keinginan untuk korupsi dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Contoh Praktis: Transparansi dan integritas adalah pilar utama dalam upaya KPK untuk memerangi korupsi. Dengan menerapkan prinsip kerendahan hati ini, komitmen birokrat untuk menjalankan jabatan mereka dengan jujur dan berfokus pada kepentingan publik dapat diperkuat.³² Tentu saja hal ini akan efektif dan efisien apabila pelatihan integritas pejabat publik yang menggabungkan prinsip kerendahan hati dapat meningkatkan budaya anti-korupsi di semua tingkat birokrasi.

3. Pendekatan Anti Kekerasan dan Damai untuk Penyelesaian Konflik

Kekerasan struktural dalam pelayanan publik Indonesia tidak selalu terlihat secara langsung. Sebaliknya, dominasi birokratik, penundaan administratif, dan hubungan kuasa yang tidak setara antara negara dan warga sering menyebabkannya. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang ditemukan dalam Injil Yesus memberikan alternatif moral terhadap praktik kekuasaan yang kejam ini.³³ Yesus berkata dalam Matius 5:9, "Berbahagialah orang yang membawa damai," dan dalam Matius 26:52, "Barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang." Jika dilihat dalam konteks konflik historis antara komunitas Yahudi dan kekuasaan Romawi, pernyataan-pernyataan ini menunjukkan penolakan terhadap kekuasaan koersif.

Pendekatan damai Yesus dapat diubah menjadi prinsip birokrasi yang non-represif dan restoratif dari sudut pandang teologi publik. Ini dapat diterapkan di Indonesia dengan menciptakan ekosistem birokrasi yang mengutamakan penyelesaian konflik melalui diskusi dan partisipasi daripada sanksi administratif atau pembungkaman laporan warga. Lembaga seperti Ombudsman dapat memperkuat peran mereka sebagai mediator dan penjamin keadilan, menciptakan hubungan yang lebih setara antara birokrat dan rakyat.³⁴ Metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa relasi damai, bukan dominasi struktural, adalah sumber keadilan yang sebenarnya.

4. Fokus pada Anti-Eksploitasi dan Kesejahteraan Bersama

Sistem ekonomi dan birokrasi kekaisaran Romawi seringkali bersifat eksploitatif—mengutamakan pungutan pajak dan pembagian kekayaan untuk memperkuat pusat kekuasaan daripada untuk kesejahteraan rakyat. Yesus

³¹ Delia Doina Mihai, "THE CORRELATION BETWEEN HUMBLENESS AND GRACE (SEEN AS EMPOWERMENT) ILLUSTRATED IN THREE BIBLICAL EXAMPLES," *BIBLICAL STUDIES JOURNAL (BSJ)* 4, no. 1 (2022): 15–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.54513/BSJ.2024.6301>.

³² Vicky Zaynul Firmansyah and Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

³³ Meru County and Ebuthania Silas Kaberia, "Journal of African Interdisciplinary Studies (JAIS) ;," *Journal of African Interdisciplinary Studies (JAIS)* 3, no. 8 (2019): 63–72, https://cedred.org/jais/images/march2022/PDF_Mipo_Dadang_Religion_and_Violence_and_Implications_on_Peace_and_Security_in_Nigeria.pdf.

³⁴ Agusta Ari Wibowo and Indra Kertati, "Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik," *Public Service and Governance Journal* 3, no. 1 (2022): 01–12, <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i1.628>.

menanggapi situasi ini dengan tegas, salah satunya dengan berkata dalam Matius 6:24, "Kamu tidak dapat mengabdikan kepada Allah dan kepada Mammon." Pernyataan ini mengkritik struktur kekuasaan yang menempatkan keadilan sosial di atas akumulasi kekayaan. Dilihat dari perspektif historis, ajaran Yesus tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berfokus pada ketidakadilan ekonomi yang disebabkan oleh birokrasi dan sistem politik yang opresif.³⁵

Prinsip kesejahteraan bersama dalam ajaran Yesus dapat digunakan sebagai kerangka etika untuk pelayanan publik dalam konteks birokrasi modern di Indonesia, di mana kesenjangan sosial dan masalah akses terhadap layanan publik masih menjadi masalah yang signifikan. Prinsip ini mendorong birokrasi untuk memprioritaskan pelayanan kelompok rentan daripada hanya memberikan sumber daya secara formal. Untuk menerapkannya, tidak hanya program seperti Kartu Indonesia Sehat atau KIP yang diperlukan, tetapi juga reformasi struktural dalam sistem penyediaan layanan agar lebih transparan, terlibat, dan berdasarkan keadilan sosial.³⁶

5. Kepemimpinan Inklusif untuk Mengatasi Budaya Hierarkis

Dalam banyak kasus, budaya birokrasi di Indonesia masih terjebak dalam struktur hierarkis yang memungkinkan hanya mereka yang berada di tingkat atas yang dapat membuat keputusan. Struktur seperti ini membatasi partisipasi publik dan memperlemah prinsip keadilan dan tanggung jawab. Dalam ajaran Yesus, terutama dalam Yohanes 13:12-15, saat Ia membasuh kaki para murid-Nya, kita menemukan model kepemimpinan yang membalik logika otoritas. Yesus, sebagai figur tertinggi, memilih untuk bertindak sebagai pelayan daripada sebagai tuan. Dalam kerangka hermeneutik historis, tindakan simbolik ini merupakan kritik sosial terhadap struktur kekuasaan yang sangat hierarkis yang dimiliki oleh orang Romawi dan Yahudi.³⁷

Secara teoretis, gagasan ini membentuk model kepemimpinan "inklusif-transformatif" di mana para pemimpin bertindak sebagai mediator diskusi, memenuhi kebutuhan, dan memungkinkan partisipasi publik. Prinsip ini diterapkan pada birokrasi Indonesia dan menuntut perubahan pada cara kebijakan dibuat dan disebarluaskan, terutama dengan memungkinkan warga menyuarakan aspirasi mereka secara aktif. Sistem digital seperti aplikasi pengaduan publik dan e-Government tidak hanya alat teknis; mereka dapat menjadi representasi moral dari

³⁵ Jeff Gossmann, "Transformational Leadership and the Rich Young Ruler: Luke 18:18-30," *Journal of Biblical Perspective in Leadership* 1, no. 1 (2020): 22-33, https://www.regent.edu/acad/global/publications/jbpl/vol10no1/Vol10Iss1_JBPL_2_Gossmann.pdf.

³⁶ A W Mahera, A Sokib, and M I Zidny, "Implementasi Prinsip Kesetaraan Dalam Akses Layanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 25498-502, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10661>.

³⁷ Amanda L. du Plessis and Carol M. Nkambule, "Servant Leadership as Part of Spiritual Formation of Theological Students in Contextualisation of 21st Century Theological Training," *HTS Theologese Studies / Theological Studies* 76, no. 2 (2020): 1-9, <https://doi.org/10.4102/hts.v76i2.5959>.

pelayanan publik jika mereka dirancang untuk menjamin keadilan, transparansi, dan keterlibatan warga dalam tata kelola.³⁸

6. Investigasi Kasus Birokrasi Etis di Negara-Negara Lain

Sebuah penelitian tentang tata kelola di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Denmark menunjukkan bahwa orientasi pelayanan dan prinsip moral dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun birokrasi. Integritas, keadilan sosial, dan akuntabilitas ditegaskan dalam model pelayanan publik negara-negara ini melalui partisipasi warga dan sistem transparansi yang kuat.³⁹ Nilai-nilai yang dipegang dalam sistem ini sangat mirip dengan etika kepemimpinan dalam Injil. Hal-hal seperti memberikan keadilan, melindungi kelompok yang rentan, dan melayani tanpa pamrih adalah contohnya, meskipun sistem ini dibuat dalam konteks sekuler.⁴⁰

Metode ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak selalu teknokratis atau hierarkis. Model birokrasi yang menekankan solidaritas dan tanggung jawab sosial dapat dikembangkan sebagai paradigma yang aplikatif, bukan hanya teologis, berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan Yesus. Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun sistem birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam kerangka kebijakan. Pada saat yang sama, mereka dapat mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia yang universal. Hasil ini memperkuat gagasan bahwa birokrasi profetik tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga dapat diterapkan ke dalam praktik pemerintahan modern yang etis dan inklusif.

Potensi Hambatan dalam Implementasi

Terlepas dari kenyataan bahwa prinsip-prinsip pelayanan, kerendahan hati, dan pengorbanan sangat penting sebagai dasar reformasi birokrasi, ada beberapa tantangan yang menghalangi pelaksanaannya dalam birokrasi Indonesia. Pertama, resistensi budaya. Dalam birokrasi Indonesia, pola relasi patron-klien dan hierarkial masih mendominasi, bertentangan dengan semangat partisipasi. Kedua, kekurangan sumber daya. Perubahan budaya organisasi membutuhkan anggaran dan pelatihan terus-menerus. Ketiga, masalah politik: reformasi birokrasi seringkali bertentangan dengan kepentingan orang-orang dalam kekuasaan politik dan mereka yang tidak ingin perubahan mendasar.

Transformasi Birokrasi

Dengan menerapkan prinsip pelayanan dan integritas, birokrasi dapat menjadi lebih jelas dan berfokus pada kesejahteraan publik. Pelatihan etika publik yang didasarkan pada nilai, sistem umpan balik digital masyarakat, dan mentoring moral harus digunakan untuk

³⁸ Nia Endri Wiranti and Aldri Frinaldi, "Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Dengan Teknologi Di Era Digital," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 748-54, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24833>.

³⁹ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Literasi: Urgensi Dan Peran Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Journal GEEJ*, Pertama, vol. 7 (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2024).

⁴⁰ Iwan Satibi and Ediyanto Ediyanto, "Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance," *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020): 234-50, <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.173>.

mewujudkan prinsip-prinsip ini. Birokrasi memiliki kemampuan untuk membangun sistem yang responsif dan etis berdasarkan prinsip Yesus, "pemimpin sebagai pelayan" (Mark. 10:42-45).

Disclaimer Hermeneutis

Catatan penting adalah bahwa Yesus tidak mendirikan birokrasi formal, seperti yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Namun, ajaran-Nya dapat dipahami sebagai prinsip moral alternatif terhadap sistem kekuasaan dominatif yang diwakili oleh birokrasi Romawi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan hermeneutika historis-kritis. Oleh karena itu, perbandingan yang dilakukan dalam artikel ini tidak berkaitan dengan institusi birokrasi secara resmi; itu lebih berkaitan dengan prinsip kepemimpinan dan orientasi nilai yang terkandung di dalamnya.

Elaborasi Historis Birokrasi Romawi

Untuk mempertahankan kekuasaan pusat dan menundukkan provinsi, sistem kekaisaran Romawi menggunakan birokrasi. Dia memiliki struktur otoritas yang sangat hierarkis, dengan pejabat lokal seperti procurator dan centurion, hingga Kaisar, yang memiliki otoritas hampir ilahi. Kepatuhan dan stabilitas kekuasaan adalah tujuan utama sistem ini, bukan pelayanan publik.⁴¹ Ekonomi dikuasai dan dieksploitasi melalui pajak dan militeristik.

Kontribusi Teologis dan Praktis

Dua bidang dipengaruhi oleh penelitian ini. Yang pertama adalah paradigma teologi birokrasi yang berpusat pada pelayanan dan kerendahan hati sebagai koreksi terhadap birokrasi kekuasaan. Yang kedua adalah manfaat praktis, dengan membangun model kepemimpinan publik yang lebih inklusif dan beretika. Dalam Filipi 2:5-8 dan Yohanes 13:1-17, ada model "birokrat sebagai pelayan" yang mendorong pemimpin publik dan ASN untuk menjadi tidak hanya pelaksana tugas tetapi juga penjaga nilai moral dan pelayanan sosial.

4. Kesimpulan

Artikel ini menawarkan sebuah paradigma alternatif yang kontekstual dan etis untuk menjawab krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi Indonesia dengan menempatkan prinsip pelayanan sebagai inti birokrasi. Menurut penelitian ini, pendekatan teologi pelayanan Yesus harus dipahami secara spiritual dan juga digunakan sebagai sumber etika administrasi publik yang transformatif. Ini sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia akan birokrasi yang efektif, rasional, dan adil yang berfokus pada kesejahteraan bersama.

Referensi

- Adi Saingo, Yakobus. "Christian Teacher and Anti-Materialistic Actualization According to the Gospel Matthew 6:19-24." *PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 18, no. 1 (2022): 64-82. <https://doi.org/10.46494/psc.v18i1.193>.
- Agusta Ari Wibowo, and Indra Kertati. "Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik." *Public*

⁴¹ Millar, *The Emperor in the Roman World*, 31 BC-AD 337, 9-24.

- Service and Governance Journal* 3, no. 1 (2022): 01–12. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i1.628>.
- Boling, Sanherib, B D Nainggolan, and A Hendrik. "Analisis Filosofis Tentang, Metode Yesus Dan Keterlibatan Jemaat Dalam Penginjilan." *MAGENANG: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (2023): 25–29. <https://doi.org/10.51667/mjtpk.v4i1.1306>.
- Chabata, Lovejoy. "Paul, the Prisoner (Acts 23:34-35): An Insight into 2018-2022 Political Prisoner's Rights in Zimbabwe." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 4 (2023): 34–35. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i4.8984>.
- Choirulsyah, Darmawan, and Azhar Azhar. "Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 195–203. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>.
- Cole, Richard. "When Gods Become Bureaucrats." *Harvard Theological Review* 113 (2) (2020): 186–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0017816020000048>.
- County, Meru, and Ebuthania Silas Kaberia. "Journal of African Interdisciplinary Studies (JAIS) :." *Journal of African Interdisciplinary Studies (JAIS)* 3, no. 8 (2019): 63–72. https://cedred.org/jais/images/march2022/PDF_Mipo_Dadang_Religion_and_Violence_and_Implications_on_Peace_and_Security_in_Nigeria.pdf.
- Craun, Justin R., and Joshua D. Henson. "Transitioning to a Servant Leadership Culture Through the Teachings of Jesus." *European Journal of Theology and Philosophy* 2, no. 2 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.24018/theology.2022.2.2.61>.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. "Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition." In *Introducing English Language*, 285–91. Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2018.
- Deslandes, G. "Weak Theology and Organization Studies." *Organization Studies* 41 (2020): 127–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0170840618789209>.
- Edwards, Aaron. "The Violence of Bureaucracy and the Gospel of Peace: A Theological Response to an Academic Problem." *International Journal of Public Theology* 12 (2) (2018): 195–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15697320-12341535>.
- Fan, Bofei, and Birong Zhang. "The Manifestations, Causes and Influences of Economic Inequality in the Roman Empire from the 4th to the 5th Centuries." *Proceedings of the 2021 International Conference on Public Art and Human Development (ICPAHD 2021)* 638, no. Icpahd 2021 (2022): 758–62. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220110.144>.
- Figueroa, Valentin. "The Protestant Road to Bureaucracy." *World Politics* 75 (2) (2023): 390–437. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/wp.2023.0006>.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Gossmann, Jeff. "Transformational Leadership and the Rich Young Ruler : Luke 18 : 18 – 30." *Journal of Biblical Perspective in Leadership* 1, no. 1 (2020): 22–33. https://www.regent.edu/acad/global/publications/jbpl/vol10no1/Vol10Iss1_JBPL_2_Gossmann.pdf.
- Harun. "Misi Sang Birokrat: Analisis Teologis Misi Birokrat Kristen Dalam Birokrasi Pemerintahan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara." (Doctoral dissertation, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja), 2024. <http://digilib-iakn-toraja.ac.id/1672/>.
- Herman, Samuel, and Rinaldi Dharmawan. "Pemimpin Sejati Dengan Pola Kepemimpinan Yesus." *Skenoo : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2024): 24–36.

- <https://doi.org/10.55649/skenoo.v4i1.82>.
- Indriani Rorong, Novita. "Budaya Kekerasan Dalam Media Elektronik Ditinjau Dari Sudut Pandang Etika Kristen." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 3, no. 1 (2020): 88–109. <https://doi.org/10.34081/fidei.v3i1.97>.
- Kalintabu, Heliyanti, and Royke Lantupa Kumowal. "Kepemimpinan Yesus Sebagai Model Bagi Pemimpin Kristen Di Sekolah Tinggi Teologi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Kristen* 3, no. 1 (2023): 63–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.51667/jmpk.v3i1.1347>.
- Mahera, A W, A Sokib, and M I Zidny. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Dalam Akses Layanan Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 25498–502. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10661>.
- Malan, G. J. "God ' s Patronage Constitutes a Community of Compassionate Equals Clients in Crisis : The Context of Understanding Metaphor Dynamic : " . . *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 2020, 1–8. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0001-9997-2368>.
- Marpaung, Sri Rizki. "Kecerdasan Emosional Menurut Matius 5:1-48 Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Untuk Remaja Di Era Digital." *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 8, no. 2 (2023): 147–63. <https://doi.org/10.33541/rfidei.v8i2.174>.
- Mihai, Delia Doina. "THE CORRELATION BETWEEN HUMBLENESS AND GRACE (SEEN AS EMPOWERMENT) ILLUSTRATED IN THREE BIBLICAL EXAMPLES." *BIBLICAL STUDIES JOURNAL (BSJ)* 4, no. 1 (2022): 15–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.54513/BSJ.2024.6301>.
- Millar, Fergus. *The Emperor in the Roman World, 31 BC–AD 337*. Cambridge. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1977.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. *Literasi: Urgensi Dan Peran Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Journal GEEJ*. Pertama. Vol. 7. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2024.
- Plessis, Amanda L. du, and Carol M. Nkambule. "Servant Leadership as Part of Spiritual Formation of Theological Students in Contextualisation of 21st Century Theological Training." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 76, no. 2 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i2.5959>.
- Prajogo, Natanael S. "Implementasi Kepemimpinan Gembala Yang Melayani Berdasarkan 1 Petrus 5:2-10 Di Kalangan Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Se-Jawa Tengah." *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 4, no. 1 (2019): 1–21. <https://doi.org/10.52104/harvester.v4i1.5>.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq, Ari Nugroho, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Nanda Saputra. Pertama. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Sampe, Naomi, and Simon Petrus. "Realita Kompleks Pemimpin Kristen : Hikmat Dan Integritas Pemimpin Kristen Menghadapi Laju Perubahan Dunia Sebagai Dampak Globalisme Dan Postmodernisme." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat* 2, no. 2 (2021): 133–46. <https://kinaa.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsdatakinaa/article/view/35%0Ahttps://kinaa.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsdatakinaa/article/download/35/24>.
- Santoso, Joko. "Pelayanan Hamba Tuhan Dalam Tugas Penggembalaan Jemaat." *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 9, no. 1 (2020): 1–26. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v9i1.55>.

- Satibi, Iwan, and Ediyanto Ediyanto. "Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance." *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020): 234–50. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.173>.
- Sidik, Humar, and Ika Putri Sulistyana. "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6224>.
- Silalahi, Misdon, Rudolf Weindra Sagala, Alvyn C. Hendriks, and Janes Sinaga. "Karakteristik Kepemimpinan Kristen Melalui Keteladanan Yesus Dalam Melayani Berdasarkan Markus 10: 43-45." *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kerusso* 8, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v8i1.272>.
- Siregar, Ersada, and Yanto Paulus Hermanto. "Sistem Pemerintahan Gereja Yang Dapat Menjaga Kepemimpinan Alkitabiah." *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 4, no. 2 (2023): 117–30. <https://doi.org/10.47530/edulead.v4i2.167>.
- Unachukwu, Daniel C. "A Study of Matthew 20:20–28 in Relation to Pentecostal Churches Leadership in Nigeria." *African Journal of Pentecostal Studies* 1, no. 1 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.4102/ajops.v1i1.13>.
- Widiyanto, Mikha Agus, and Armin Sukri. "Perwujudan Kebahagiaan Dalam Relasi Interpersonal: Implementasi Etika Kerajaan Allah Berdasarkan Matius 5:3-9." *Kurios* 8, no. 1 (2022): 175. <https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.547>.
- Wiranti, Nia Endri, and Aldri Frinaldi. "Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Dengan Teknologi Di Era Digital." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 748–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24833>.
- Wuk, Michael. "Constructing Christian Bureaucrats: Justinian and the Governor's Oath of Office." *Journal of Late Antiquity* 15 Number (2022): 462–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/jla.2022.0024>.